Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Volume 18, No.1, 2019

Artikel Hasil Penelitian

POLITIK HUKUM PELINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA PASCA DI RATIFIKASINYA TRIPS AGREEMENT

Imam Wicaksono**

** Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Legal Politics, Legal Protection, Intellectual Property Rights, TRIPS Agreement

Kata kunci:

Politik Hukum, Pelindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, TRIPS Agreement

Abstract

Intellectual property rights actually not a new thing in Indonesia, since the Dutch East Indies Government, Indonesia has a law on Intellectual Property Rights. The regulation of Intellectual Property Right enactment of the laws of the Dutch East Indies government, imposed in Indonesia as a Dutch colony based on the concordance principle. At that time regulation of Intellectual Property Rights in Indonesia had just received three sector; Copyright, Trademarks, and Patents. Expansion of the regulation of Intellectual Property Rights in Indonesia has only been carried out after the ratification of the TRIPS Agreement. In this study the author will analyze the legal politics of protecting intellectual property rights before the ratification of the TRIPS Agreement. And what is the legal policy of the protection of intellectual property rights after the ratification of the TRIPS Agreement. This legal research is normative legal research. The results showed that with the emergence of a new law replacing the old colonial-made law, the understanding and scope of intellectual property rights protection in Indonesia became wider. The amendment to the Intellectual Property Rights Act in Indonesia cannot be separated from the ratification of the TRIPS Agreement and Indonesia's involvement in world trade.

Abstrak

Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai undang-undang tentang Hak Kekayaan Intelektual yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda yang berlaku di Negeri Belanda, diberlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip konkordansi. Pada masa itu bidang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia baru mendapat pengakuan baru 3 (tiga) bidang, yaitu Hak Cipta, Merek Dagang, dan Industri serta Paten. Perluasan pada pengaturan dibidang Hak Kekayaan Intelektual di Indoneisa baru dilakukan setelah diratifikasinya TRIPS Agreement. Pada penelitian ini penulis akan menganalisis tentang politik hukum pelindungan Hak Kekayaan Intelektual sebelum di ratifikasinya TRIPS Agreement. Serta Bagaimanakah kebijakan politik hukum terhadap pelindungan Hak Kekayaan Intelektual setelah di ratifikasinya TRIPS Agreement. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan munculnya Undang-Undang yang baru menggantikan Undang-Undang yang lama buatan kolonial membuat pengertian dan cakupan pelindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia semakin luas. Perubahan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia tidak terlepas di ratifikasinya TRIPS Agreement dan keterlibatan Indonesia ke dalam perdagangan dunia.

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai undang-undang tentang Hak Kekayaan Intelektual yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda yang berlaku di Negeri Belanda, diberlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip konkordansi. Pada masa itu bidang hak kekayaan intelektual mendapat pengakuan baru 3 (tiga) bidang Hak Kekayaan Intelektual, yaitu Hak Cipta, Merek Dagang, dan Industri serta Paten. Adapun peraturan perundang-undangan Belanda bidang Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:¹

- a. *Auterswet* 1912 (Undang-Undang Hak Pengarang 1912, Undang-Undang Hak Cipta; S.1912-600)
- b. *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912; S.1912-545 jo S.1913-214)
- c. *Octrooiwet* 1910 (Undang-Undang Paten 1910; S.1910-33,yis S.1911-33,S.1922-54.

Undang-Undang Hak Cipta pertama di Belanda diundangkan pada tahun 1803, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1817 dan diperbarui lagi sesuai dengan Konvensi Bern 1886 menjadi *Auterswet* 1912, Indonesia (Hindia Belanda saat itu) sebagai negara jajahan Belanda terikat dalam Konvensi Bern tersebut, sebagaimana diumumkan dalam S.1914-797. Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912 merupakan Undang-Undang merek tertua di Indonesia, yang ditetapkan oleh pemerintah Kerajaan Belanda berlaku sejak tanggal 1 Maret 1913 terhadap wilayah-wilayah jajahannya Indonesia, Suriname, dan Curacao. Undang-Undang Paten 1910 tersebut mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1912. Reformasi hukum dalam bidang HAKI di Indonesia disebabkan dengan adanya kewajiban Internasional negara Indonesia berkaitan dengan Konvensi Pembentukan WTO (*World Trade Organization*). Konvensi tersebut mewajibkan seluruh anggotanya untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi tersebut, khususnya *Annex 1b* Konvensi tersebut, yaitu Perjanjian TRIPS (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Konvensi tersebut telah memberikan batas waktu bagi negara-negara anggotanya untuk melakukan penyesuaian hukum nasionalnya di bidang HAKI dengan ketentuan-ketentuan dalam TRIP yaitu 1 (satu) tahun bagi negara maju dan 4 (empat) tahun bagi negara berkembang.²

Sebagai salah satu negara berkembang maka Indonesia harus menyesuaikan hukum nasionalnya di bidang HAKI paling lambat pada bulan Januari 2000. Atas Kebijakan tersebut Indonesia mengeluarkan Undang-undang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang meliputi UU No 29 Tahun 2000 Tentang Pelindungan Varietas Tanaman, UU No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, UU No 31 Tentang Desain Industri, UU No 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU No 14 Tahun 2001 Tentang Paten, UU No 15 Tentang Merk dan UU No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang menyangkut dengan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual, seperti PP No 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan UU No 31 Tahun 2000 dan PP Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.³ Adanya pengaturan hukum yang baru terhadap kekayaan intelektual

¹ Karlina Sofyarto, 'Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20.1 (2018), 149–62 <<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9832>>.

² Kholis Roisah and others, 'Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual', *Masalah-Masalah Hukum*, 43.3 (2014), 372-379–379 <<https://doi.org/10.14710/mmh.43.3.2014.372-379>>.

³ V. Selvie Sinaga, 'Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual Di Kalangan Usaha Kecil Menengah Batik', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21.1 (2014), 61–80 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art4>>.

merupakan kebijakan politik hukum terhadap perlindungan HKI di Indonesia dengan di ratifikasinya TRIPS. Pada saat ini Indonesia telah memiliki peraturan hukum baru terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan revisi dari beberapa peraturan terdahulu seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hak Terkait, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.⁴

Berubahnya kebijakan politik hukum terhadap perlindungan HKI yang diikuti dengan di ratifikasinya TRIPS di Indonesia membuat politik hukum terhadap perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual ikut berubah. Perubahan kebijakan tersebut sebagai suatu pernyataan kehendak negara mengenai hukum yang berlaku di wilayah dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun melalui badan-badan negara dalam menetapkan peraturan-peraturan khususnya upaya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Kebijakan perubahan tersebut merupakan justifikasi bahwa HKI adalah upaya seseorang yang mengeluarkan usaha kedalam penciptaan, memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan.⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia se Dunia “setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan (untuk kepentingan moral dan materi) yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan atau artistik dalam hal dia sebagai pencipta”. Baik itu pencipta maupun inventor sering membutuhkan banyak uang dan waktu untuk mencipta dan menemukan sesuatu. Jika orang lain bebas untuk meniru dan menjual karya-karya mereka, mereka mungkin tidak mendapatkan uang dari ciptaan dan invensi mereka (atau paling tidak cukup mengganti waktu dan uang yang telah mereka keluarkan. Maka bisa dibayangkan jika tidak ada kebijakan politik terhadap perlindungan HKI para pencipta dan para inventor mungkin memutuskan untuk tidak mencipta dan menemukan sesuatu. Oleh karena kebijakan politik hukum terhadap hak Kekayaan Intelektual menarik diteliti oleh penulis karena ada beberapa alasan seperti berikut.⁶

1. Kebijakan Hak Kekayaan Intelektual merupakan sesuatu yang sudah lama ada di Indonesia dan berlaku sejak zaman Hindia Belanda dengan menggunakan asas konkordasi.
2. Pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual disebabkan akibat belum sadarnya masyarakat Indonesia terhadap apresiasi suatu kekayaan intelektual khususnya sebuah karya cipta.
3. Dilihat dari banyaknya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual bahwa kebijakan politik hukum terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual masih belum maksimal penerapannya di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, tulisan ini akan membahas mengenai kebijakan politik hukum terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebelum di ratifikasinya TRIPS *Agreement*, dan kebijakan politik hukum terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual setelah di ratifikasinya TRIPS *Agreement*.

PEMBAHASAN

Peraturan Perundang-Undangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Sebelum TRIPS *Agreement*

Undang-Undang HAKI yang pertama kali berlaku di Indonesia adalah produk hukum Belanda, yang dialihkan dan diterapkan di Indonesia oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda selama masa penjajahan. Belanda kemudian juga menjadi peserta Konvensi Paris dan Konvensi Bern atas nama

⁴ Afifah Kusumadara, ‘Pemeliharaan Dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Non-Hak Kekayaan Intelektual’, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18.1 (2011), 20–41 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art2>>.

⁵ Luh Inggita Dharmapatni, ‘Hak Cipta Sebagai Suatu Objek Jaminan Fidusia’, *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 2.2 (2018) <<https://doi.org/10.25139/lex.v2i2.1412>>.

⁶ Iswi Hariyani, ‘Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Gadai Dan Fidusia’, *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM*, 23.2 (2016), 294–319 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art7>>.

daerah jajahannya. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem hukum yang pluralistis di Indonesia. Hukum Belanda berlaku bagi warga negara Eropa dan Asia, sementara hukum adat sendiri digunakan bagi masyarakat pribumi kecuali beberapa hal yang mencakup mereka semua atau manakala hukum adat dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan barat yang telah diakui. Hukum adat sendiri tidak mengakui keberadaan HAKI, sehingga kebanyakan masyarakat Indonesia jarang atau sama sekali tidak berurusan hukum HAKI tersebut, kecuali Undang-Undang Merek.⁷

Perubahan kebijakan politik terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dimulai sejak di ratifikasinya TRIPS (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property*) yang merupakan bagian dari persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia WTO (*World Trade Organization*). Dengan keikutsertaannya Indonesia ke dalam WTO mengharuskan Indonesia untuk melakukan penyesuaian legislasi nasional yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual. Pelbagai norma-norma dan standar-standar pengaturan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang termuat dalam persetujuan TRIPS harus sesegera mungkin untuk dinasionalisasikan ke dalam perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual kita, sehingga akan tercipta harmonisasi pengaturan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dengan yang berlaku di negara lain. Ciri-ciri pokok persetujuan TRIPS ini pada dasarnya berpola pada tiga hal yaitu:⁸

1. TRIPS lebih berpola pada norma-norma dan standar-standar yang berbeda dari persetujuan-persetujuan internasional lain, terutama perjanjian-perjanjian di bidang perdagangan barang (*trade in goods*) yang lebih banyak berpola pada aspek-aspek seperti akses ke pasar dan tarif.
2. Sebagai persyaratan minimal TRIPS menetapkan sebagai salah satu cirinya, yaitu *full compliance* terhadap beberapa perjanjian internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual.
3. TRIPS memuat ketentuan-ketentuan mengenai penegakan hukum yang ketat berikut mekanisme penyelesaian sengketa yang diberi sarana berupa hak bagi negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan-tindakan balasan di bidang perdagangan secara silang.

Selain ketiga ciri diatas, ada juga tiga unsur yang terkandung dalam TRIPS yang perlu dicermati oleh negara-negara yang bermaksud untuk menyesuaikan perundang-undangan nasionalnya di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Ketiga unsur yang dimaksud adalah unsur-unsur yang berupa norma-norma baru, standar-standar yang lebih tinggi dan penegakan hukum yang ketat.⁹ Selain keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO yang diharuskan untuk merubah peraturan terhadap Hak Kekayaan Intelektual faktor yang lain adalah tekanan dari pihak luar yang turut melatar belakangi terjadinya perubahan kebijakan hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Indonesia pada saat itu merupakan satu-satunya negara ASEAN yang masih masuk ke dalam *Priority Watch List* oleh USTR (*United States Trade Representative*) untuk kasus-kasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. USTR merupakan Lembaga perwakilan yang bertugas menelaah catatan-catatan dari negara-negara mitra dagang Amerika Serikat. Pada tahun 2000, peringkat Indonesia membaik dengan masuk kategori *Watch list*, disebabkan pada tahun 2000 pemerintah Indonesia telah mengajukan RUU Tentang Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu serta mengajukan RUU Revisi terhadap Undang-Undang Paten dan Merek. Akan tetapi, peringkat ini tidak bertahan lama, karena pada tahun 2001 dan 2002 Indonesia kembali lagi masuk kedalam kategori *Priority Watch List*.¹⁰ Meskipun Indonesia telah

⁷ Khoirul Hidayah and Ulama Hanafiah, 'Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek', *Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek*, 6.1 (2014), 1–9.

⁸ Sri Mulyani, 'Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia', *Jurnal Dinamika Hukum*, 12.3 (2012), 568–78 <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.128>>.

⁹ Liana E Susanti, 'Economic Law Creation Beautiful Global Indonesia', *Bestuur*, 7.1 (2019), 47–53 <<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/42701>>.

¹⁰ I.G.A.K. Rachmi Handayani, Lego Karjoko, and Abdul Kadir Jaelani, 'Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Eksekutabilitas Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Bestuur*, 7.1 (2019), 36–46 <<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/42700>>.

memperbaiki peraturan hukum pada bidang Hak Kekayaan Intelektual, penegakan hukum terutama atas kekayaan intelektual oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat masih dirasakan lemah.¹¹ Bukan hanya terhadap hak kekayaan intelektual oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat saja yang masih lemah, penegakan hak kekayaan intelektual terhadap produk-produk dalam negeri pun masih lemah. Hal ini dicontohkan masih banyaknya beredar barang-barang bajakan di pasar Indonesia.¹²

Beredarnya barang-barang bajakan di Indonesia disebabkan diluarnya kemampuan masyarakat dalam membeli barang orisinal, dengan adanya persaingan antar pembajak terhadap barang-barang bajakan telah menekan harga barang asli yang akhirnya masyarakat sebagai konsumen akan membeli barang bajakan dengan harga yang lebih murah daripada barang asli, hal ini ditambah dengan ketidaktahuan masyarakat terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap suatu barang. Ungkapan yang beredar di masyarakat bahwa “buat apa beli yang lebih mahal kalau ada yang lebih murah” membuat barang-barang bajakan di Indonesia “laku keras”.¹³ Dengan pemberlakuan WTO, pemerintah Indonesia menderita kerugian sekitar \$1,9 Miliar, sayangnya pemerintah Indonesia tanpa merinci cara perhitungannya. Sejak di ratifikasinya TRIPS dan keterlibatan Indonesia dalam perdagangan global membuat muncul dua cara pandang terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual. Yaitu cara pandang bahwa Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dan penegakan hak-haknya merupakan bagian dari perjanjian internasional yang diikuti Indonesia, sehingga harus ada penyesuaian tanpa peduli adanya ketimpangan posisi dan kesempatan dan cara pandang sebaliknya yaitu yang menganggap perjanjian internasional mengenai Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari WTO akan menegaskan ketimpangan antarnegara di dunia dan membuat negara industri maju mendapat keuntungan lebih dulu.¹⁴

Di bawah aturan WTO, semakin banyak perusahaan Transnasional yang mengklaim Hak Kekayaan Intelektual paten dan tumbuhan, bibit tanaman dan produk lain yang lahir dari dunia ketiga serta tidak pernah dianggap sebagai milik siapa pun. Pioneer Hi-Breed International dari Amerika Serikat sekarang menguasai 17 Paten Padi, sementara Mitsui Toatsu Chemical dari Jepang telah memiliki 13 hak paten. Bahkan Tempe sudah diklaim oleh sebuah perusahaan Jepang. Banyak anggapan bahwa peraturan Hak Kekayaan Intelektual merupakan produk kolonialisme baru yang dilakukan oleh beberapa negara maju terhadap negara berkembang. Situasi ini pun merambah ke kalangan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada saat merumuskan Rancangan Undang-Undang mengenai Hak Kekayaan Intelektual, para wakil rakyat tidak urung menunjukan sikap ganda terhadap peraturan ini, misalnya adanya berbagai pendapat tentang rendah atau tingginya ancaman pidana bagi pelanggar hak kekayaan intelektual. Disamping masalah penyebaran, sosialisasi atau diseminasi konsep hak kekayaan intelektual, masalah besar lain adalah penegakan hukum, yang punya kaitan juga dengan masalah penyebaran tadi yang intinya adalah bahwa sistem hak kekayaan intelektual memberikan perlindungan hukum bagi pemilik karya intelektual. Sementara itu konsep hak kekayaan intelektual terus menjalani proses. Dimasukkannya hak kekayaan intelektual sebagai dari sistem perdagangan internasional adalah contoh dari proses tersebut.¹⁵

Lahirnya TRIPS dalam konstelasi politik internasional, perlu dilihat apakah pembaharuan sistem hak kekayaan intelektual di Indonesia semata-mata didorong untuk mengkomodifikasi hal itu.

¹¹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 28

¹² Ahmad Dwi Nuryanto, ‘Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan’, *Bestuur*, 7.1 (2019), 54 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.43437>>.

¹³ Febry Wulandari and W Waluyo, ‘Efektivitas Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Bidang Kesehatan Di Kota Surakarta Tahun 2018’, *Jurnal Bestuur*, 7.1 (2019).

¹⁴ C.D. Balenina, ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar’, *Bestuur*, 7.1 (2019), 26–35 <<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.28418>>.

¹⁵ Maria Alfons, ‘Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum’, *Legislasi Indonesia*, 14.03 (2017), 1–10 <<http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/111/pdf>>.

Atau apakah Indonesia yang memiliki karakter seni, budaya, keanekaragaman hayati dan lain sebagainya, dapat menonjolkan berbagai karakter tersebut yang berkaitan dengan berbagai potensi lokal. Indonesia pun aktif berperan dalam komunitas Internasional untuk terus mengembangkan sistem hak kekayaan intelektual yang berguna bagi kemanusiaan.¹⁶

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPS Agreement

Lahirnya perubahan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual tidak terlepas dari desakan Negara-Negara berkembang terhadap reformasi perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual ada secara hukum jika telah ada pengayoman, penaungan atau perlindungan hukum dari negara atau otoritas publik terhadap suatu karya intelektual. Melalui mekanisme pengurusan dokumentasi diberikan hak kepada pemohon hak kekayaan intelektual, termasuk Investor, pendesain serta pemilik merek. Disini terdapat 3 unsur utama yaitu : (1) hak eksklusif, (ii) negara, dan (iii) jangka waktu tertentu. Dengan hak yang didapat dari otoritas publik, tumbuh lah eksklusivitas atau kepemilikan sehingga si pemilik dapat melarang pihak lain menggunakan hak tersebut tanpa izinnnya.¹⁷ Pengayoman, penanungan atau perlindungan hukum kedua di samping pemberian hak seperti terurai di atas adalah penegakan hukum (*law enforcement*). Tidak ada gunanya pemberian hak, jika tidak ada penegakan hukum yang sepadan. Secara esensial hak eksklusif adalah monopoli untuk jangka waktu dan dengan syarat-syarat tertentu.¹⁸ Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang bersifat individual. Karya intelektual yang telah mendapat atau telah dikemas secara eksklusif yang oleh sebab itu merupakan "*property*", sehingga pemilik karya tersebut dapat menciptakan pasar (permintaan dan penawaran). Hal ini timbul karena pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Itulah sebabnya dalam hak kekayaan intelektual misalnya paten, dipersyaratkan adanya unsur penerapan industrial (*Industrial applicability*) yakni dapatnya invensi yang bersangkutan diterapkan dalam industri. Secara ringkas hak kekayaan intelektual merupakan pendorong bagi pertumbuhan perekonomian.¹⁹

Dengan diratifikasinya TRIPs di Indonesia membuat beberapa peraturan tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia mengacu beberapa poin implementasi terhadap TRIPs. Pada dasarnya TRIPs memuat tiga pokok persoalan yaitu persoalan *pertama* adalah peraturan yang memuat peraturan-peraturan umum dan prinsip-prinsip dasar yang dipedomani oleh negara-negara anggota WTO. *Kedua* memuat standar mengenai pemberian, ruang lingkup dan penggunaan dari masing-masing Hak Kekayaan Intelektual yang disebutkan dalam persetujuan TRIPs tersebut, dan *ketiga* memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan kewajiban-kewajiban negara-negara anggota WTO untuk melakukan penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual dari upaya hukum yang dapat ditempuh dalam rangka melindungi dan mempertahankan Hak Kekayaan Intelektual.²⁰ Persetujuan TRIPs ini diadakan dengan maksud untuk mengurangi gangguan (*distortion*) dan hambatan (*impediment*) dalam perdagangan internasional dan kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan secara efektif dan memadai terhadap Hak Kekayaan Intelektual dan untuk menjamin bahwa proses serta langkah-langkah penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri

¹⁶ Ni Ketut Supasti, 'Relevansi Hak Kekayaan Intelektual Dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua', *Jurnal Dinamika Hukum*, 14.3 (2014), 518–27 <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.323>>.

¹⁷ Sigit Nugroho, 'Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean', *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 24.2 (2017), 164–78 <<https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.164-178>>.

¹⁸ Roisah and others.

¹⁹ Kholis Roisah, 'Kebijakan Hukum "Transferability" Terhadap Perlindungan Hak', *Jurnal Law Reform*, 11.2 (2015), 241–54.

²⁰ Winda Risna Yessiningrum and others, 'Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual', 2015, 42–53.

tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan. Untuk mewujudkan maksud diatas, diperlukan adanya berbagai aturan baru serta sistem pengawasan mengenai:²¹

- a. Penerapan prinsip-prinsip dasar GATT (*General Agreement Tarifs and Trade*) 1994 berikut berbagai persetujuan dan Konvensi Internasional yang berkaitan dengan bidang Hak atas Kekayaan Intelektual
- b. Pemberlakuan standar dan prinsip-prinsip yang memadai mengenai pemberian hak, ruang lingkup serta penggunaan Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dalam kegiatan perdagangan.
- c. Penyelenggaraan sarana yang efektif dan sesuai bagi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan kegiatan perdagangan, dengan memperhatikan perbedaan sistem hukum nasional yang ada (*Differences in National legal systems*)
- d. Penyelenggaraan prosedur yang efektif dan singkat (*effective and expeditious*) bagi pencegahan (*prevention*) dan penyelesaian sengketa antar pemerintah (*settlement of disputes between governments*)
- e. Aturan peralihan yang memungkinkan partisipasi secara penuh dalam persetujuan-persetujuan hasil perundingan.

Bagian Pertama dari persetujuan TRIPS tersebut menetapkan ketentuan –ketentuan umum dan prinsip-prinsip dasar yang wajib dilaksanakan oleh negara peserta yang berisikan komitmen untuk memberikan perlakuan yang sama secara nasional (*national treatment*) terhadap semua warganegara dari negara peserta WTO atau anggota WIPO di bidang hak atas kepemilikan Intelektual. Prinsip lainnya yang dimuat dalam persetujuan TRIPS tersebut adalah prinsip *free to determine*. Berdasarkan prinsip *free to determine* ini, setiap negara peserta WTO atau anggota WIPO dapat menentukan metode yang paling sesuai dengan menjabarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Persetujuan TRIPS ini ke dalam sistem dan praktik hukumnya masing-masing.²²

Bahkan mereka menerapkan dalam hukumnya, sistem perlindungan yang lebih luas daripada yang diwajibkan berdasarkan Persetujuan TRIPS, dengan syarat hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Persetujuan TRIPS. Dengan demikian, berdasarkan prinsip ini negara peserta WTO atau anggota WIPO dapat saja membuat ketentuan yang sifatnya khusus sebagai jabaran lebih lanjut daripada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Persetujuan TRIPS atau persetujuan-persetujuan lainnya di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Indonesia sebagai anggota WIPO dan WTO di berikan ketentuan-ketentuan yang lebih luas untuk diterapkan dalam sistem hukum nasionalnya terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Persetujuan TRIPS hanya memuat standar minimum perlindungan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Atas kebijakan ini di Indonesia lahir peraturan perundang-undangan baru mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia yang menggantikan peraturan perundang-undangan lama yang merupakan produk kodifikasi dari zaman Hindia Belanda. Agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam peraturan Hak atas Kekayaan Intelektual, maka perlu dibuat penyesuaian perangkat hukum nasional yang merupakan akomodasi dari ketentuan-ketentuan perjanjian TRIPS. Beberapa ketentuan TRIPS yang dapat mengisi kekosongan perangkat hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual, adalah sebagai berikut :²³

1. Hak royalti (*Rental Rights*) bagi pemegang hak cipta rekaman video/film dan komputer program.
2. Pelindungan bagi Pertunjukan, dan Rekaman suara. (*Performers, Producer of Phonograms, Sound Recording and Broadcasts.*
3. Pengaturan tentang Indikasi Geografis (*Geographical Indication*)
4. Pelindungan atas Desain Industri dan Desain Industri Tata Letak Terpadu (*Lay out Design and Integrated Circuit*)
5. Perlindungan terhadap Rahasia Dagang (*Undisclosed Information*)

²¹ Kusumadara.

²² Hidayah and Hanafiah.

²³ Hariyani.

Beberapa ketentuan perangkat hukum nasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual tersebut di ubah dan menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dari TRIPS ke dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional, yang menyangkut tentang :

1. Pelindungan Hak Cipta atas program komputer yang lamanya tidak kurang dari limapuluh (50) tahun, sementara dalam undang-undang Hak Cipta hanya duapuluh lima (25) tahun.
2. Isi Hak yang diberikan dalam Paten dan Merek tidak sekedar terbatas pada hak untuk memakai, menyewakan, menjual atau memberi Hak kepada orang lain guna memakai atau melarang orang lain memakai tanpa persetujuannya tetapi juga meliputi hak untuk melarang impor produk yang dilindungi oleh Paten.
3. Perlindungan Paten harus diberikan untuk duapuluh (20) tahun, sementara dalam Undang-Undang Paten hanya 14 Tahun.
4. Diintroduksinya sistem pembuktian terbalik dalam rangka pelindungan terhadap pemegang Hak Paten atas proses, sekalipun hal itu dalam kasus perdata.
5. Diwajibkan pemberian pelindungan hukum secara *sui generis* terhadap penemuan teknologi di bidang varietas baru tanaman, sekalipun suatu negara berdasarkan persetujuan TRIPS ini sebenarnya dibolehkan untuk mengecualikannya dari sistem Paten Nasional.

Seiring berjalannya penyesuaian sistem hukum nasional Hak Kekayaan Intelektual terhadap ketentuan-ketentuan dari TRIPS, Indonesia mengeluarkan beberapa Undang-undang baru dan Peraturan Pemerintah dalam pelindungan Hak Kekayaan Intelektual, Undang-undang ini meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Langkah ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut Indonesia terhadap ketentuan TRIPS dalam peraturan perundang-undangan Nasional dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual. Selain menyetujui TRIPS, yang menjadi dasar perubahan peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Indonesia juga menyetujui dan menandatangani Perjanjian Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) dari 110 negara anggota yang hadir pada tanggal 15 April 1994. Maka sebagai konsekuensinya pemerintah telah meratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods* (Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan Perdagangan) sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan pada Bagian IV huruf C angka 11. Hal ini merupakan hasil format perundingan Uruguay yang perjanjiannya berisi perjanjian di bidang jasa dan perjanjian di Bidang Hak Kekayaan Intelektual.²⁴

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, pada bagian IV huruf C angka 11 disebutkan bahwa : “*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods* (*Aspek-aspek Hak atas Kekayaan Intelektual yang terkait dengan perdagangan, termasuk perdagangan barang palsu*)”. Perundingan di bidang ini bertujuan untuk :

- 1) Meningkatkan pelindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan.
- 2) Menjamin prosedur pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan.
- 3) Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan pelindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

²⁴ Muhammad Yuris Azmi, ‘Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia’, *Universitas Sebelas Maret*, IV.1 (2016), 97–106.

- 4) Mengemban prinsip, aturan, dan mekanisme kerja sama Internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Hak kekayaan Intelektual.

Kesemuanya tetap memperhatikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) WIPO (*World Intellectual Propety Organization*) sebagai badan otoritas internasional di bawah PBB, yang menaungi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di seluruh dunia, memegang regulasi penting terhadap peraturan-peraturan Hak Kekayaan Intelektual. Indonesia sebagai, negara peserta WIPO dan pihak yang turut meratifikasi Perjanjian putaran Uruguay dan TRIPS terus berupaya menyesuaikan sistem hukum nasionalnya mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini dengan di keluarkannya Undang-Undang baru mengenai Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.²⁵ Undang-Undang baru ini menafsirkan lebih jelas perumusan sebuah hasil karya seni pertunjukan, program komputer dan hasil karya dari fotografi sebagai hasil dari sebuah karya cipta. Selain di keluarkannya Undang-Undang Hak Cipta yang baru Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang Paten yang baru yaitu Undang-Undang 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang menggantikan Undang-Undang Paten yang lama yaitu Undang-Undang 14 Tahun 2001. Dalam rumusan Undang-Undang Paten yang baru, memuat rumusan yang lebih rinci yang berkaitan dengan paten. Dalam Undang-Undang Paten yang baru terdapat penjelasan tentang masa berlaku lisensi jangka waktu paten sederhana dan paten biasa. Dalam paten sederhana jangka waktu lisensinya adalah sepuluh (10) tahun sedangkan paten biasa adalah duapuluh (20) tahun. Selain mengeluarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Paten yang baru, Pemerintah juga sedang mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Tentang Merek.²⁶

Yang menarik dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Merek ini adalah dicantumkannya Indikasi Geografis ke dalam Rancangan Undang-Undang tentang Merek, berbeda pada peraturan perundang-undangan sebelumnya dimana Indikasi Geografis terpisah dari Undang-Undang Merek. Perubahan Peraturan perundang-undangan yang baru ini di dasarkan oleh posisi Indonesia sebagai negara anggota WTO (*World Trade Organization*) dan meminimalisir sengketa Hak Kekayaan Intelektual dalam perdagangan internasional maupun dalam nasional.²⁷

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan pada pokok permasalahan yang diajukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: a. Bahwa dengan munculnya Undang-Undang yang baru menggantikan Undang-Undang yang lama buatan kolonial membuat pengertian dan cakupan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia semakin luas. b. Perubahan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia tidak terlepas di ratifikasinya TRIPS *Agreement* dan keterlibatan Indonesia ke dalam perdagangan dunia. Sedangkan saran dari penulis adalah Dalam hal meratifikasi Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, Indonesia selayaknya memperhatikan hak-hak kekayaan komunal yang melekat dalam masyarakat tradisional. Karena selama ini pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia masih mengedepankan Hak individu pencipta dan kurang memperhatikan hak komunal milik masyarakat tradisional.

²⁵ Widya Marthauli Handayani, 'Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16.2 (2019), 214–24.

²⁶ Ferry Kiandi, 'Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Margin Trading Dan Short Sales Di Pasar Modal', *FH Universitas Sumatera Utara*, 2014, 1–18.

²⁷ I Made Bagus and Satria Yudistira, 'Merek Sebagai Jaminan Fidusia dalam Proses Pengajuan Kredit di Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 magister hukum udayana •', 20, 2017, 310–22.

REFERENCES

- Alfons, Maria, 'Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum', *Legislasi Indonesia*, 14.03 (2017), 1–10 <<http://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/111/pdf>>
- Azmi, Muhammad Yuris, 'Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia', *Universitas Sebelas Maret*, IV.1 (2016), 97–106
- Bagus, Made, and Satria Yudistira, 'Merek Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Proses Pengajuan Kredit Di Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Magister Hukum Udayana •', 20, 2017, 310–22
- Balenina, C.D., 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar', *Bestuur*, 7.1 (2019), 26–35 <<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.28418>>
- Dharmapatni, Luh Inggita, 'Hak Cipta Sebagai Suatu Objek Jaminan Fidusia', *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 2.2 (2018) <<https://doi.org/10.25139/lex.v2i2.1412>>
- Handayani, I.G.A.K. Rachmi, Lego Karjoko, and Abdul Kadir Jaelani, 'Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Eksekutabilitas Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Bestuur*, 7.1 (2019), 36–46 <<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/42700>>
- Handayani, Widya Marthauli, 'Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16.2 (2019), 214–24
- Hariyani, Iswi, 'Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Gadai Dan Fidusia', *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM*, 23.2 (2016), 294–319 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art7>>
- Hidayah, Khoirul, and Ulama Hanafiah, 'Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek', *Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek*, 6.1 (2014), 1–9
- Kiandi, Ferry, 'Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Margin Trading Dan Short Sales Di Pasar Modal', *FH Universitas Sumatera Utara*, 2014, 1–18
- Kusumadara, Afifah, 'Pemeliharaan Dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Non-Hak Kekayaan Intelektual', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18.1 (2011), 20–41 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art2>>
- Mulyani, Sri, 'Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia', *Jurnal Dinamika Hukum*, 12.3 (2012), 568–78 <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.128>>
- Nugroho, Sigit, 'Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean', *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 24.2 (2017), 164–78 <<https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.164-178>>
- Nuryanto, Ahmad Dwi, 'Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan', *Bestuur*, 7.1 (2019), 54 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.43437>>
- Roisah, Kholis, 'Kebijakan Hukum "Transferability" Terhadap Perlindungan Hak', *Jurnal Law Reform*, 11.2 (2015), 241–54
- Roisah, Kholis, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, and Tembalang Semarang, 'Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual', *Masalah-Masalah Hukum*, 43.3 (2014), 372–379–379 <<https://doi.org/10.14710/mmh.43.3.2014.372-379>>
- Sinaga, V. Selvie, 'Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual Di Kalangan Usaha Kecil Menengah Batik', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21.1 (2014), 61–80

- <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art4>>
- Sofyarto, Karlina, 'Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20.1 (2018), 149–62
<<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9832>>
- Supasti, Ni Ketut, 'Relevansi Hak Kekayaan Intelektual Dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua', *Jurnal Dinamika Hukum*, 14.3 (2014), 518–27
<<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.323>>
- Susanti, Liana E, 'Economic Law Creation Beautiful Global Indonesia', *Bestuur*, 7.1 (2019), 47–53
<<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/42701>>
- Wulandari, Febry, and W Waluyo, 'Efektivitas Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Bidang Kesehatan Di Kota Surakarta Tahun 2018', *Jurnal Bestuur*, 7.1 (2019)
- Yessiningrum, Winda Risna, Winda Risna, Yessiningrum Perlindungan, Hukum Indikasi, Geografis Sebagai, and Bagian Dari, 'Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual', 2015, 42–53